

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEAMANAN MASYARAKAT DI KAWASAN PERBATASAN

**Mahendra**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** The development policy orientation at the border has been more developmental for border areas rather than development for border communities, meaning that development focuses more on economic development with efforts to manage existing natural resources and less emphasize the development of human resources, so that local communities around the border area remains a spectator not actively involved and representative in the implementation process of development, so they are still poor, marginal and less secure and empowered in their lives. This happens because of the lack of education and skills they have so that they are less able to have high competitiveness and productivity. This study uses a public security perspective from nonconventional reviews, namely the development of community security from social, economic, political and cultural aspects. Methodologically, this research was conducted with a qualitative approach and the collected data were analyzed by interpretive data analysis both primary data and secondary data. The results of this study indicate that the role of local government in the development of community security is limited to activities relating to the administration of government functions only. The lack of understanding of the development of community security has an impact on the disorientation of regional development policies, especially in areas that are concentrated such as Pulau Rangsang and Coastal Stimulus. Factors that influence the role in development are the factors limiting authority and regional disparity.

**Abstrak:** Orientasi kebijakan pembangunan di perbatasan selama ini lebih bersifat pembangunan untuk kawasan perbatasan bukan pembangunan untuk masyarakat perbatasan, artinya pembangunan lebih banyak terfokus kepada pembangunan ekonomi dengan upaya untuk mengelola sumber daya alam yang ada dan kurang menekankan pembangunan sumber daya manusianya, sehingga masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan perbatasan tetap menjadi penonton tidak terlibat secara aktif dan representatif dalam proses implementasi pembangunan, maka mereka masih tetap miskin, marginal dan kurang terjamin dan diberdayakan kehidupannya. Hal ini terjadi karena masih minimnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka kurang mampu memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi. Kajian ini menggunakan perspektif keamanan masyarakat dari tinjauan nonkonvensional yaitu pembangunan keamanan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Secara metodologis, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis data interpretatif baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam pembangunan keamanan masyarakat terbatas pada aktifitas-aktifitas yang berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan saja. Minimnya pemahaman mengenai pembangunan keamanan masyarakat berdampak pada disorientasi kebijakan pembangunan daerah terutama pada kawasan yang menjadi konsern seperti Pulau Rangsang dan Rangsang Pesisir. Faktor yang mempengaruhi peran dalam pembangunan itu yaitu faktor batasan kewenangan dan disparitas wilayah.

**Kata Kunci:** Pemerintah daerah, pembangunan, keamanan masyarakat

## PENDAHULUAN

Meskipun pembangunan perbatasan sudah bersifat otonom dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kawasan mereka, namun pelaksanaan pembangunan masih jauh dari yang diharapkan dan masih kurang tepat sasaran. Masyarakat lokal masih dalam keadaan yang miskin, marginal dan jauh dari hasil pembangunan karena yang mengecap hasil

pembangunan dan terlibat langsung dalam pembangunan perbatasan adalah masyarakat pendatang, baik yang datang dari daerah terdekat dan juga dari daerah lain.

Persoalan pembangunan keamanan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai masyarakat di kawasan perbatasan perlu dilihat secara holistik. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, angka kemiskinan, putus sekolah,

pengangguran dan daya beli masyarakat yang rendah masih menjadi persoalan dominan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti masih berkisar pada persoalan ekonomi. Diakui memang persoalan distribusi barang kebutuhan pokok menjadi penyebab tingginya harga barang dan berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran dan putus sekolah sudah menjadi masalah klasik bahkan sejak Kabupaten ini dimekarkan pada tahun 2009. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipisahkan oleh laut dan sungai nyatanya berdampak luas pada askes masyarakat terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya.

Kurangnya perhatian pemerintah (pusat) pada daerah perbatasan (Kepulauan Meranti) ini juga menjadi persoalan yang serius, sebab pembangunan wilayah perbatasan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta dengan wewenang yang juga terbatas dirasa menjadi sulit untuk mampu mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang senjang antara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, belum lagi persoalan ketersediaan listrik sebagai sumber utama penerangan masyarakat yang kondisinya juga sangat memprihatinkan (menurut catatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, masih ada 4 Kecamatan yang kesulitan dalam penyediaan energi listrik yaitu Kecamatan Rangsang dan Rangsang Pesisir, Tasik Putri Puyuh dan Kecamatan yang ada di Pulau Merbau).

Selain itu, persoalan-persoalan kejahatan transnasional narkotika, *illegal trading*, *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking* masih menjadi persoalan pokok yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Memang jika jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Garis besar kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pembangunan dari wilayah pinggiran menjadi angin segar bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan termasuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Permasalahan keamanan masyarakat di kawasan perbatasan tidak hanya dilihat dari aspek keamanan militer. Dalam iklim global saat ini, justru tantangan non militer menjadi lebih kuat seperti permasalahan di atas. Hadirnya negara (pemerintah pusat dan daerah) dianggap mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, namun nyatanya statistik permasalahan di kawasan perbatasan belum menunjukkan penurunan grafik permasalahan.

Orientasi kebijakan pembangunan di perbatasan selama ini lebih bersifat pembangunan untuk kawasan perbatasan bukan pembangunan untuk masyarakat perbatasan. Artinya pembangunan lebih banyak terfokus kepada pembangunan ekonomi dengan upaya untuk mengelola sumber daya alam yang ada dan kurang menekankan pembangunan sumber daya manusianya. Akibatnya masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan perbatasan tetap menjadi penonton, tidak terlibat secara aktif dan represantatif dalam proses implementasi pembangunan. Mereka masih tetap miskin, marginal dan kurang terjamin dan diberdayakan kehidupannya. Hal ini terjadi karena masih minimnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mereka kurang mampu memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pembangunan keamanan masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

## METODE

Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif (Cresswell, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dengan berbagai *stakeholders* serta wawancara mendalam dengan informan penting dalam melihat peran pemerintah daerah dalam

pembangunan keamanan masyarakat di wilayah perbatasan. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data melalui metode interaktif (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Dengan demikian dapat diketahui berbagai permasalahan yang menjadi penyebab masih belum optimalnya kinerja kelembagaan dalam pembangunan keamanan masyarakat perbatasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Keamanan Masyarakat di Kawasan Perbatasan**

Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik. Pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Pulau Rangsang dan Rangsang Pesisir misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya kemudahan dalam akses perkenomian atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga (Malaysia). Majoritas masyarakat di Pulau Rangsang yang berprofesi sebagai pedagang merupakan pedagang lintas batas dan aktifitas mereka sebagai pedagang lintas batas sudah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kesenjangan pembangunan yang nyata antara Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi menjadi persoalan utama terjadinya kecemburuan sosial masyarakat Pulau Rangsang. Ketidakhadiran negara dalam kurun waktu yang panjang itu selain mempengaruhi sikap kecintaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah juga terhadap lingkungan mereka sendiri.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat termasuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah sekitar serta masyarakat negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan.

Kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah Pulau Merbau dan Pulau Rangsang misalnya sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah Karimun, Batam dan Malaysia. Minimnya aksesibilitas darat dan keluar itu merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di juga sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi untuk dapat bersaing dengan wilayah lain terlebih dengan negara tetangga.

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu kawasan perbatasan Indonesia dianggap memiliki karakteristik sebagai kawasan pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas dan berbatasan secara langsung dengan Singapura dan Malaysia (Lanal Dumai, 2015). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyadari bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah persoalan kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Sejak dimekarluhan pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas perekonomian masyarakat serta membuka keran investasi daerah. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan perbatasan negara juga menghadapi isu strategis seperti pengelolaan kekayaan sumberdaya alam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti memang paradoks dengan sumberdaya alamnya. Potensi sumberdaya alam yang besar belum mampu dimanfaatkan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, bahkan di beberapa lokasi dieksplorasi secara ilegal oleh pihak asing (perusahaan maupun aktifitas deforestasi dan *illegal fishing*). Menghadapi persoalan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan memerlukan perhatian ekstra mengingat keterbatasan akses distribusi produk pertanian masyarakat sebagai mata pencarian pokok disamping nelayan dan produk lainnya sehingga menimbulkan dampak terhadap harga barang serta mutu barang.

Pada kasus yang lain misalnya, berdasarkan data agregat Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2017) kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu kawasan dengan tingkat deforestasi yang sangat mengkhawatirkan mengingat kawasan ini merupakan kawasan pulau-pulau kecil dan dengan kontur wilayah gambut. Eksplorasi sumberdaya alam hayati di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan diera otonomi daerah justru semakin meningkat sementara itu kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada lingkungan secara umum belum menunjukkan perubahan yang signifikan khususnya pada kawasan pedesaan Meranti. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan keamanan masyarakat diperbatasan perlu dilihat sebagai suatu upaya yang sistematis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pada kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam merubah arah kebijakan pembangunan kewilayahan selama ini cenderung berorientasi '*inward looking*' sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang tercermin dari rendahnya alokasi pembiayaan pembangunan, dimana pembangunan

yang hanya diarahkan pada pusat kota, serta adanya fakta keterbelakangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan sarana-prasarana.

Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya dicirikan oleh taraf pendidikan dan kesehatan perbatasan yang masih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan belum menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, yang mengakibatkan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan tertinggal dibanding daerah lain. Budaya hidup sehat masyarakat di wilayah perbatasan umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit, yang diperburuk dengan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis.

Ketidaaan lapangan pekerjaan mendorong terjadinya kegiatan ilegal di perbatasan. Praktek perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang misalnya, merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adanya kesempatan kerja di sektor perikanan yang tersedia di wilayah perbatasan mendorong penduduk untuk menyeberang ke Malaysia yang tidak membutuhkan ketrampilan tinggi sehingga memunculkan praktik perdagangan manusia (Bappenas, 2004). Demikian pula praktik-praktek illegal logging yang merusak kawasan lindung di perbatasan tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu penanganan yang komprehensif dan perlu mempertimbangkan realitas sosial budaya di atas yang khas.

Pembangunan keamanan masyarakat perbatasan selama ini dipandang hanya sebagai urusan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah lalai dalam memperhatikan aspek-aspek keamanan yang justru menjadi kewenangan daerah misalnya bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengakui bahwa ketertinggalan pembangunan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat dan daya saing masyarakat dikancanah lokal dan

regional. Pasca berdiri sebagai daerah otonom, praktis Kabupaten Kepulauan Meranti mengelola segala potensi dan sumberdaya yang ada di daerah itu. Demikian halnya dengan status kepegawaian aparatur pemerintah daerah. Persoalan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan nyatanya belum berbanding lurus dengan kesiapan birokrasi daerah.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Pemerintah dalam Pembangunan Keamanan Masyarakat di Kawasan Perbatasan**

Pembangunan keamanan masyarakat pada kawasan perbatasan ditinjau dari pendekatan nonkonvensional menuntut adanya pemahaman terhadap konsep keamanan masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang sifatnya terbatas dan sejatinya, pembangunan keamanan masyarakat tidak hanya terkait dengan konsep pembangunan keamanan itu sendiri melainkan pembangunan daerah secara keseluruhan. Maka terkait dengan itu, berikut dijabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pembangunan keamanan masyarakat di wilayah perbatasan kasus Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **Kewenangan Daerah**

Sejumlah arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan yang berorientasi pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah telah dikeluarkan. Namun demikian, belum optimalnya keberpihakan kebijakan sektor terkait menyebabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut belum mendorong pembangunan di kawasan perbatasan secara signifikan. Lahirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan dapat melakukan lompatan dalam merespon ketidakpuasan masyarakat terkait pembangunan di kawasan perbatasan agar mengurangi efek negatif hubungan dengan negara tetangga. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc dalam acara Pembahasan Hasil Pekerjaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan bagi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan mengungkapkan terdapat lima aspek yang perlu diperhati-

kan dalam pembangunan kawasan perbatasan yaitu:

1. aspek batas wilayah;
2. aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum,
3. aspek ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
4. aspek pelayanan sosial dasar; dan
5. aspek kelembagaan

Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan termasuk membangun keamanan masyarakatnya menjadi alasan utama persoalan pengelolaan keamanan perbatasan tidak menjadi skala prioritas bagi pemerintah daerah.

#### **Disparitas Wilayah**

Disparitas wilayah merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Perbedaan pertumbuhan ekonomi ini mendorong terjadinya perbedaan kesejahteraan masyarakatnya. Disparitas wilayah terjadi bukan hanya di negara yang miskin saja, akan tetapi terjadi di setiap negara baik negara berkembang maupun negara belum berkembang, negara agraris atau industri, negara besar atau kecil. Perbedaan di antara kedua wilayah ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya; pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, perbankan, asuransi, pendidikan, pelayanan kesehatan, perkembangan infrastruktur, fasilitas perumahan, dan sebagainya. Menurut Murty (2000), berbagai faktor utama penyebab terjadinya disparitas regional menurut antara lain; geografi, sejarah, politik, kebijakan pemerintah, administrasi, sosial, dan ekonomi.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan paradigma keamanan manusia, maka pada umumnya pembangunan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat, dengan adanya keseimbangan fokus pembangunan baik pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sumber daya manusia yang ada sebagai objek dan aktor pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini ada dua komponen utama dalam keamanan

manusia (1) aman dari ancaman (2) perlindungan dari ancaman. Fokus utama keamanan manusia tidak hanya berupa tindakan untuk mengatasi ancaman, namun juga berupa tindakan pencegahan terjadinya kembali ancaman tersebut dengan memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan dan kesehateraan masyarakat yang berkelanjutan, yang tentunya dimulai oleh peranan pemerintah dalam membentuk jaringan keamanan manusia baik berupa jaringan sosial maupun ekonomi serta membentuk payung hukum untuk melindungi kepastian berlanjutnya keamanan manusia tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Edi Soeharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Eilenberg, Michael. 2005. "Borderland Strategies – Fluid Borders and Flexible Identities: A Case of the Iban in West Kalimantan, Indonesia." Master's thesis, Department of Anthropology and Ethnography. Denmark: University of Aarhus.
- Haq, Mahbub ul. 1995. *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Hilmi Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Yogyakarta: Averroes Pres
- Martinez, Oscar J. 1994b. "The Dynamics of Border Interaction: New Approaches to Border Analysis." In *Global Boundaries, World Boundaries*. Volume 1., ed. Clive H. Schofield, pp 1-15. London: Routledge.
- Martinussen, J. 1997. *Society, State and Market: A Guide to Competing Theories of Development*. London & New York: zed Books Page
- Michiel, and Willem van Schendel. 1997. "Toward a Comparative History of Borderlands." *Journal of World History* 8: 211-242
- Riwanto Tirtosudarmo. 2002. *Kalimantan Barat sebagai Daerah Perbatasan: Sebuah Perspektif Demografi-Politik*. Jurnal Antropologi Indonesia 67. Volume Khusus
- Robert Picciotto & Rachel Weaving (eds). 2006. *Security and Development in Investing in Peace and Prosperity*. London: Routledge
- Robert Siburian. 2002. "Entikong: Daerah tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak." Antropologi Indonesia 67: 87-93
- Sen, Amartya. 2006. *Identity and violence the illusion of destiny*. London : Allen LaneSfeir.
- Shahrbanou Tadjbakhsh & M. Chenoy, Anuradha. 2007. *Human Security Concepts and Implications*. London: Routledge
- United Nation Development Program (UNDP). 1994. *Redefining Security the Human Dimension*, dalam Current History v 94. 229-236 JurnalBaud,
- Wadley, R. L., and Eilenberg, M. 2005. "Autonomy, Identity and "Illegal" Logging in the Borderland of West Kalimantan, Indonesia." The Asia Pacific Journal of Anthropology 6: 19-34.